

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10396474>

Peran *Official Statistics* dalam Pengambilan Kebijakan untuk Mengurangi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Aulia Zahra Rahmah¹

¹Politeknik Statistika STIS
Email: 12212524@stis.ac.id

Abstrak

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih ada kesenjangan antar daerah, terutama antara Pulau Jawa dan Pulau Papua. Hal itu dapat diukur dari variabel persentase angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan penguasaan teknologi masyarakatnya. Variabel tersebut dapat didapatkan melalui data *Official Statistics* Badan Pusat Statistika (BPS). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru yang menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Tujuan dibuatnya artikel ini, yaitu untuk menjelaskan apa saja peran data *Official Statistics* untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam upaya mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Melalui pembahasan yang dijabarkan, didapatkan enam peran *Official Statistics* adalah (1) membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan pendidikan; (2) untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan; (3) membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program pendidikan; (4) sebagai pemantauan kemajuan; (5) dasar pengalokasian sumber daya; (6) dasar penyelidikan dan riset. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan data statistik melalui modernisasi untuk memaksimalkan pengambilan kebijakan bidang pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci : Official Statistics, kesenjangan pendidikan, kebijakan pemerintah

Article Info

Received date: 03 December 2023

Revised date: 7 December 2023

Accepted date: 12 December 2023

PENDAHULUAN

Semua warga Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang sama. Hal ini sejalan dengan tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disebut SDGs) yang sedang gencar diperjuangkan. Keberhasilan SDGs memiliki peluang yang cukup besar atas kecemerlangan masa depan suatu negara, tetapi juga tantangan yang besar bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia (Amirya & Irianto, 2023). Salah satu tujuan SDGs yang menyita perhatian yaitu tujuan SDGs nomor empat berkaitan dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Penting adanya evaluasi kembali kualitas pendidikan di Indonesia, mengingat dampaknya yang besar terhadap angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia dalam suatu negara. Makmurnya kualitas Pendidikan suatu daerah, dapat ditunjukkan melalui persentase angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan penguasaan teknologi masyarakatnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka melek huruf di Indonesia pada mempunyai rata-rata sebesar 99.63 dengan tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 99.97 dan terendah sebesar 92.04 berada di Provinsi Papua. Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah untuk umur di atas 15 tahun pada tahun 2022 di Indonesia berada di angka

9.08 dengan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 11.2 tahun dan terendah di Provinsi Papua sebesar 7.31 tahun. Selain itu, pada variabel penguasaan teknologi masyarakatnya, proporsi remaja dan dewasa usia 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK) di Indonesia sebesar 90.13 persen, tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 98.74 persen dan terendah berada di Provinsi Papua sebesar 33.06 persen. Dari uraian beberapa variabel tersebut, terbukti masih adanya ketimpangan antara Pendidikan Indonesia di Pulau Jawa dan Papua.

Untuk menjawab berbagai persoalan yang ada, data statistik resmi atau Official Statistics

sangat diperlukan untuk mendukung pembuatan kebijakan yang dihasilkan pemerintah demi mengentaskan permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama kesenjangan yang terjadi antarprovinsi-nya. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan dibuatnya artikel ini, yaitu untuk menjelaskan apa saja peran data statistik resmi untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam upaya mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur atau studi literatur. Dalam (Putrihapsari & Fauziah, 2020) mengartikan studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai langkah awal dalam perencanaan pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan tanpa perlu terjun secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Masalah Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan pada Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 memuat isibahwa pendidikan merupakan upaya yang terencana dan sadar dalam membantu mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik atau siswa mampu untuk mengembangkan potensi dalam dirinya dengan aktif dan mempunyai pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan di masyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Melihat hasil data yang diperoleh UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report yang dilakukan pada tahun 2016, mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia menduduki tingkat 10 dari 14 negara berkembang yang ada di dunia (Utami, 2019). Sementara itu, merujuk kepada hasil survey Programme for International Student Assessment (PISA) yang merupakan sebuah organisasi yang menilai mutu pendidikan di dunia, pada tahun 2018 peringkat kualitas pendidikan di Indonesia masih berada di kedudukan golongan rendah, yaitu dengan menduduki peringkat 72 dari 78 negara. Hasil data tersebut cenderung stagnan di dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir (Susiani, 2021).

Berbagai survei telah dilakukan untuk menganalisis solusi dari masalah yang terjadi. Namun, sampai saat ini, masih saja ada kesenjangan yang signifikan dalam hal akses dan kualitas pendidikan, khususnya Pulau Jawa dan Pulau Papua. Selain itu, daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi salah satu faktor ketimpangan tersebut. Hal ini karena sekolah perkotaan jauh lebih unggul daripada sekolah pedesaan dalam hal kualitas. Infrastruktur kota dan fasilitas sekolah dapat berkembang dengan baik, tetapi di daerah pedesaan, banyak infrastruktur yang tidak layak. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan adalah kurangnya infrastruktur pedagogis. 760.000, atau sekitar 59%, dari

1.300.000 kelas kapal yang ada masih beroperasi, dengan 299.000, atau sekitar 23 %, rusak berat dan 242.000 sisanya, atau sekitar 18%, rusak berat. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti sebelumnya, bahwa sekolah umum dan pedesaan serta daerah terpencil masih terkendala masalah sarana dan prasarana (Agustang et al., n.d.)

Upaya Pemerintah Mengatasi Kesenjangan Pendidikan

Melihat dari permasalahan yang ada, pemerintah melakukan evaluasi pengelolaan biaya pendidikan yang belum optimal. Contohnya, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) serta Pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Diberlakukan juga berbagai bantuan pemerintah, yaitu **KIP** (Kartu Indonesia Pintar), **PIP** (Program Indonesia Pintar), **BLT** (Bantuan Tunai Langsung), **BOS** (Dana Bantuan Operasional Sekolah), **BSU** (Bantuan Subsidi Upah). Selain itu, Kemendikbud memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Mengajar. Mereka diutus ke daerah pelosok yang kekurangan guru untuk membimbing siswa-siswa.

Pengertian Official Statistik

Official Statistics (selanjutnya disebut OS) dapat didefinisikan dengan tiga kriteria utama berdasarkan buku Statistical Organization Handbook ke-4. OS adalah statistik yang

menggambarkan fenomena ekonomi, demografi, sosial dan lingkungan yang memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam, pada tingkat geografis yang berbeda dari subnasional, melalui tingkat nasional hingga supranasional dan internasional. OS dihasilkan oleh badan statistik resmi atau badan publik lainnya yang ditunjuk dan diindikasikan sebagai statistik resmi dalam undang-undang yang relevan. OS dikembangkan, diproduksi, dan disebarluaskan sesuai dengan UNFPOS (A/RES/68/261) serta standar statistik, kode, dan rekomendasi yang disepakati secara internasional yang meningkatkan kepercayaan dan memastikan konsistensi dan kualitas yang tinggi (United Nations, 2022).

Ada tiga kriteria OS lainnya, yaitu kualitas, lembaga yang mengeluarkan, dan akses publik. Pertama, kualitas berarti tidak semua statistik yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah dan organisasi internasional memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk dianggap sebagai statistik resmi. Kedua, lembaga yang mengeluarkan, perusahaan swasta dan universitas bisa saja terlibat dalam produksi statistik resmi, tetapi pada akhirnya hanya pemerintah atau organisasi internasional yang merilisnya. Ketiga, akses publik berarti OS harus dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, OS disebut sebagai *public goods* (Yusrina D., 2021). Di Indonesia, lembaga yang menaungi OS adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Peran *Official Statistics* (OS) dalam Pengambilan Kebijakan

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah pastinya tidak lepas dari analisis data yang akurat. Pentingnya data didukung oleh adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui bahwa kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (gatra.com, 2019). Seiring dengan amanah Presiden terkait Reformasi Birokrasi, dan semakin banyaknya tuntutan ketersediaan data oleh pengguna data, serta kesadaran BPS sendiri untuk menghasilkan data yang berkualitas, BPS melakukan segala upaya perubahan untuk menjawab kebutuhan semua stakeholder. Pada permasalahan pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa peran penting OS, berkaitan dengan data yang dihasilkannya.

Pertama, OS dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan pendidikan di antara berbagai kelompok masyarakat, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial. Data statistik yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat akses, partisipasi, dan hasil pendidikan di berbagai wilayah dan kelompok penduduk.

Kedua, data OS digunakan untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan. Data statistik yang dihasilkan menyediakan dasar untuk perencanaan kebijakan pendidikan yang efektif. Ini membantu pemerintah dalam merancang strategi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Melalui analisis data, kebijakan pendidikan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus kelompok yang rentan atau terpinggirkan.

Ketiga, OS sebagai evaluasi efektivitas program pendidikan. OS membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program-program pendidikan. Dengan mengukur hasil dan dampaknya, pemerintah dapat menilai efektivitas investasi pendidikan. Evaluasi program pendidikan juga membantu dalam menentukan apakah program-program tersebut berhasil mengurangi kesenjangan dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Keempat, OS sebagai pemantauan kemajuan. Data statistik yang dihasilkannya berperan dalam pemantauan kemajuan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ini mencakup tingkat kelulusan, partisipasi, dan hasil ujian nasional atau internasional. Pemantauan ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan.

Kelima, Data yang dihasilkan OS bermanfaat dalam pengalokasian sumber daya. OS membantu dalam pengalokasian sumber daya secara efisien. Pemerintah dapat menggunakan data untuk menentukan di mana alokasi anggaran pendidikan sebaiknya ditingkatkan atau diarahkan agar efektif mengurangi kesenjangan.

Keenam, OS sebagai penyelidikan dan riset. OS mendukung riset dan penyelidikan di bidang pendidikan. Ini memungkinkan para peneliti untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan dan mencari solusi yang tepat. Dengan menggunakan data OS, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan tepat sasaran dalam upaya

mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Data tersebut juga berperan dalam memastikan bahwa sumber daya yang ada dialokasikan dengan efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh negara.

Dampak Apabila *Official Statistic(OS)* Dihilangkan

Jika tidak ada OS atau data resmi yang tersedia untuk suatu topik atau area, hal itu memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, terjadi ketidakpastian informasi. Tanpa OS, informasi yang tersedia mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diverifikasi. Ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan analisis.

Kedua, ketidakmampuan perencanaan yang efektif. OS sering digunakan dalam perencanaan pembangunan, kebijakan publik dan pengambilan keputusan bisnis. Tanpa data yang andal, perencanaan jangka panjang mungkin menjadi sulit atau tidak efektif.

Ketiga, kesulitan mengukur kinerja. OS membantu dalam mengukur kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanpa data dari OS, sulit untuk menilai dampak dari kebijakan atau program tertentu, terutama masalah kesenjangan pendidikan.

Keempat, ketidakmampuan mendeteksi perubahan dan tren. Statistik membantu dalam mengidentifikasi perubahan dan tren dalam masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Tanpa data OS, mungkin sulit untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin memerlukan perhatian atau tindakan.

Kelima, adanya kemungkinan ketidakmampuan untuk menanggapi krisis. Dalam situasi krisis atau darurat, data statistik yang cepat dan akurat sangat penting untuk menentukan respons yang efektif. Tanpa data ini, respons terhadap situasi krisis mungkin kurang terorganisir atau tidak optimal.

Keenam, adanya ketidakmampuan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan. Statistik membantu dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program. Tanpa data yang sesuai, sulit untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau inisiatif.

Ketujuh, kurangnya dasar untuk riset dan analisis yang kuat. Statistik menyediakan dasar untuk riset ilmiah dan analisis dalam berbagai bidang. Tanpa data resmi, riset dan analisis mungkin terbatas, dan pengembangan pengetahuan bisa terhambat.

Perlunya Meningkatkan Pengelolaan Data *Official Statistk*

Perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini sudah seharusnya diiringi dengan *modernisasi* dalam OS. Menurut Abdul Syam, modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek *Official Statistics*, modernisasi adalah mendesain ulang proses bisnis statistik pada data yang dikumpulkan, diproses dan disebarluaskan (Surya P, 2021). Faktor diperlukannya modernisasi dalam OS antara lain tantangan dan ancaman yang semakin beragam, seperti globalisasi, keinginan masyarakat dalam hal efisiensi, dan adanya prinsip menggunakan biaya minimum dan hasil yang maksimum. Data yang ada saat ini kebanyakan merupakan data mentah sehingga belum dapat digunakan dalam analisis bidang lain, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Maka dari itu, perlu dilakukan proses analisis yang tepat, akurat, dan efisien supaya dalam satu data tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

Menurut Yunarso Anang, Ph.D dalam kuliah umum yang bertema “Inovasi metodologi dan teknologi informasi di BPS dalam menghasilkan *Official Statistics* yang lebih baik untuk mendukung Satu Data Indonesia” menjelaskan bahwa BPS sedang Menyusun rencana dalam modernisasi maupun transformasi baik dari aspek metodologi, teknologi, maupun *quality control*. Salah satu langkah yang diambil BPS yaitu pengintegrasian data SDGs yang berada di website BPS.

Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini, BPS perlu kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kerja sama seperti pembinaan data statistik bagi kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Pembinaan tersebut seperti memberikan petunjuk teknis standar data statistik dan metadata, pembinaan dan rekomendasi terhadap statistik sektoral, dan adanya Indonesia Data Hub (INDAH) dengan tujuan untuk menggabungkan data yang dihasilkan lembaga lain dengan data yang ada di BPS. Selain itu, pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik akan mendukung pelaksanaan modernisasi dalam *official statistics* di BPS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada enam peran *Official Statistics* dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia, antara lain membantu dalam mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan pendidikan, untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan, membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program pendidikan, sebagai pemantauan kemajuan, dasar pengalokasian sumber daya, dan dasar penyelidikan dan riset.

Dengan demikian, dapat disarankan juga untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola data statistik melalui modernisasi dengan lebih serius dalam rangka memaksimalkan pengambilan kebijakan bidang pendidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Agustang, A., Asrifan, A., & Ainun Mutiara, I. (n.d.). *Masalah Pendidikan di Indonesia Oleh*.
Amirya, M., & Irianto, G. (2023). TANTANGAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 187–198. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>
- Surya P, W. (2021). Pentingnya Modernisasi dan Adaptasi Official Statistics dalam Menghadapi Perkembangan Zaman. *Statgov.Id*, 1–11.
- United Nations. (2022). 4th Edition of the Handbook of Statistical Organization. *Departement Of Economic and Social Affairs*.
- Yusrina D., C. (2021). Modernisasi Official Statistics Sebagai The Cornerstones Of Good Government. *Statgov.Id*, 1–11.